



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUB UNIT KERJA : BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD SOFYAN SOURI**
2. Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
3. NHK : **237045**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.698.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m²/98 m² di LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.332.000.000
2. Tanah Seluas 244 m² di LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 366.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 85.100.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SABRE BG 7 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR GSX R150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. LAINNYA, POLIGON SEPEDA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000
4. MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.300.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 28.912.089**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.847.312.089**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.847.312.089

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.